

PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN JAWA PADA ABAD KE 19

Eka Sulis Yuniarti

SMA Negeri 1 Kutorejo, Mojokerto

Abstrak: Pada awal abad ke-19 M, laki-laki dan perempuan Jawa memiliki kesempatan yang berbeda dalam memperoleh pendidikan. Laki-laki memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan formal dibandingkan perempuan. Dalam budaya Jawa peran perempuan adalah sebagai ibu yang mendidik anak-anak, serta mengurus urusan rumah tangga, sehingga pendidikan dianggap kurang penting bagi perempuan. Padahal pendidikan bagi perempuan merupakan salah satu cara agar dapat menuangkan ide-ide serta gagasan para perempuan. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan karakteristik dan konsep pendidikan bagi perempuan di Jawa pada abad ke 19. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan bagi perempuan merupakan salah satu cara untuk memberantas buta huruf yang masih banyak dialami oleh para perempuan sekitar tahun 1900-an. Pada lingkungan sosial, pendidikan yang diperoleh perempuan mampu meningkatkan harkat dan martabat para perempuan di masyarakat.

Kata kunci: Pendidikan, Perempuan, Jawa

Abstract: In the early 19th century AD, Javanese men and women had different opportunities for education. Men have a greater chance of getting formal education than women. In the Javanese culture the role of women is as the mother who educates the children, and takes care of the household affairs. Hence, Javanese people acknowledges education as less substantial for women. Though, for women, education is one of many ways to actualize their ideas. This article try to analyze the characters and concept of education for Javanese women in the 19th century. The article illustrate that education is ultimate way to eradicate illiteracy problems experienced by Javanese women in 19th century. On the social aspects, education believed to elevate the dignity of women.

Keywords: Education, Women, Java

PENDAHULUAN

Pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda setelah adanya *Politik Etis* (politik balas budi) tahun 1899 yang meliputi tiga bidang yaitu irigasi, edukasi dan transmigrasi. Setelah adanya kebijakan *Politik Etis*, pemerintah kolonial memberikan perhatian khusus dalam bidang pendidikan. Pada masa kolonial Belanda, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial. Kebijakan yang ada di Hindia-Belanda saat itu tentu juga dibuat untuk kepentingan kolonial, seperti kebijakan *Politik Etis*. Meskipun

Belanda mengeluarkan kebijakan *Politik Etis* yang salah satunya tentang perbaikan dan peningkatan dalam bidang pendidikan namun pendidikan yang diselenggarakan saat itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah kolonial. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda digunakan untuk mendidik *ambtenaar* (pegawai negeri) yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial.

Soekiman (2011:41) menyatakan bahwa pendidikan bagi perempuan tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Pendidikan bagi perempuan dianggap kurang penting karena perempuan sekedar dianggap sebagai pendamping

suami dalam bergaul dengan para pejabat Belanda, perempuan sebagai penerima tamu dan menyiapkan jamuan bagi para tamu. Peran perempuan sebagai ibu yang mendidik anak-anak tetap dianggap penting.

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia hingga saat ini. Kenyataannya pendidikan yang ada di wilayah Jawa, pada mulanya terjadi ketimpangan antara kedudukan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan bagi perempuan hingga awal 1900 Masehi pendidikan bagi perempuan Indonesia khususnya di wilayah Jawa belum mendapatkan perhatian yang lebih banyak jika dibandingkan dengan pendidikan bagi kaum laki-laki. Pada tahun 1900 masih terdapat perbedaan antara kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi kaum laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki memiliki kesempatan dan peluang yang lebih luas untuk mendapatkan pendidikan dibandingkan dengan perempuan. Pada artikel ini akan mengkaji secara lebih mendalam terkait dengan karakteristik perempuan Jawa dan konsep pendidikan perempuan Jawa Abad ke-19.

KARAKTERISTIK PEREMPUAN JAWA

Menurut Margana & Nursam (2010: 87) kata perempuan berasal dari kata *empu*, yang bermakna dihargai, dipertuan, atau dihormati, sedangkan kata wanita berasal dari *wan* yang berarti nafsu, dalam Bahasa Jawa (Jawa Dorsok) kata wanita berarti berani ditata. Maka peneliti menggunakan istilah *perempuan* yang memiliki pemaknaan lebih baik. Menurut Mangunwijaya (1980:5) berdasarkan *Serat Wedatama* (surat wanita sejati) perempuan Jawa diasosiasikan

untuk menjadi makhluk yang sejati, artinya pengabdian yang setia kepada lelaki, sumarah dan sumber kenikmatan bagi laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai perempuan Jawa hendaknya menjadi seseorang yang patuh terhadap laki-laki.

Handayani & Novianto (2004:130) karakter wanita Jawa sangat identik dengan budaya Jawa seperti bertutur kata halus, tenang, diam (*kalem*), tidak suka konflik, mementingkan harmoni, menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, mampu mengerti dan memahami orang lain, sopan, pengendalian diri tinggi, daya tahan untuk menderita tinggi, memegang peranan secara ekonomi dan setia.

Berdasarkan pendapat di atas terlihat bahwa perempuan Jawa merupakan perempuan yang sangat menjunjung kebudayaan Jawa. Beberapa ciri khas orang Jawa lainnya yaitu *sabar lan neriman* (sabar dan menerima dengan lapang dada). Sikap tersebut membuat sebagian besar perempuan Jawa selalu menerima apa yang telah menjadi kodratnya sebagai seorang perempuan, meskipun hal itu justru membuat perempuan Jawa cenderung dianggap lemah kedudukannya jika dibandingkan dengan laki-laki.

Begitu pula dalam bidang pendidikan, bahwa seorang perempuan Jawa tidak dapat dengan mudah mendapatkan pendidikan seperti kaum laki-laki. Perempuan selalu diidentikkan dengan urusan rumah tangga saja, sedangkan laki-laki lebih berperan dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan kurang memiliki peran dalam kehidupan sosial di masyarakat karena pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dalam sektor yang berbeda.

Perempuan Jawa hendaknya menjadi seseorang yang patuh terhadap laki-laki. Mangunwijaya (1980:5) menjelaskan berdasarkan *Serat Wedatama* (surat wanita

sejati) perempuan Jawa diasosiasikan untuk menjadi makhluk yang sejati, artinya pengabdian yang setia kepada lelaki, *sumarah* dan sumber kenikmatan bagi laki-laki, sejalan dengan pemikiran tentang perempuan Jawa yang mengabdikan pada laki-laki. Ada beberapa konsepsi paternalistik yang berkembang dalam masyarakat Jawa bahwa perempuan Jawa sebagai istri adalah *konco wingking*. Istilah *konco wingking* tersebut berarti bahwa perempuan berada di belakang laki-laki. Seolah kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kedudukan laki-laki.

Pada tahun 1918 perempuan Jawa mulai bisa menerima gagasan baru dan pemikirannya menjadi lebih terbuka. Perempuan Jawa yang sebelumnya sangat memegang teguh tradisi dan kebudayaan Jawa kini mulai sadar akan pentingnya pendidikan yang dapat meningkatkan derajatnya sebagai seorang perempuan. Pernyataan mengenai perempuan Jawa yang telah mendapatkan pendidikan pada tahun 1918 dapat analisis berdasarkan pernyataan Gouda (2007:137) pada tahun 1918 gadis Jawa diibaratkan bagaikan ‘bunga melati’ yang elok dan wangi menebar ke seluruh masyarakat Jawa. Artinya pada tahun 1918 perempuan Jawa sebagai sosok yang dapat menerima gagasan baru melalui pendidikan dan mampu memberikan perubahan bagi seluruh masyarakat Jawa yang sebelumnya bersifat tradisional yang berpegang teguh pada tradisi feodal Jawa.

Perempuan Jawa yang dimaksud adalah perempuan-perempuan kalangan atas yang memiliki kedudukan sosial lebih tinggi di masyarakat Jawa. Mereka pun dapat memperoleh kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan karena status sosial yang mereka sandang, bukan perempuan desa yang menghabiskan sebagian waktunya untuk urusan rumah tangga, dan bekerja tanpa mendapatkan pendidikan sama sekali.

Menurut Sewojo dalam Stuers (2008: 63-64) ada empat kelas perempuan Jawa yang digolongkan berdasarkan status sosial mereka di masyarakat, yaitu:

- a) Golongan miskin. Para perempuan di kelas sosial ini tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Mereka belajar melakukan pekerjaan di sawah dan menjual hasilnya. Terkadang mereka juga belajar menjahit. Hidup mereka sangat keras, tetapi mereka cukup bebas.
- b) Golongan menengah (cukup mampu). Para perempuan di kelas sosial ini juga tidak bersekolah dan mereka pun belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah. Mereka biasanya menikah pada usia 12 sampai 15 tahun. Setelah menikah biasanya mereka membant suaminya bekerja di sawah atau berdagang. Mereka diperlakukan dengan baik oleh suaminya karena mereka sebenarnya dapat menafkahi kehidupannya sendiri. Golongan santri. Para perempuan di kelas sosial ini tidak bersekolah, tetapi mendapatkan pelajaran agama di rumah. Mereka biasanya mulai menikah pada usia 15 tahun. Mereka begitu dihargai oleh para suaminya karena secara umum mereka memiliki kemampuan lebih jika dibandingkan dengan golongan sebelumnya, terutama pengetahuan tentang agama.
- c) Golongan priyayi (para bangsawan). Beberapa dari mereka dapat belajar di bangku sekolah dasar. Sejak usia 12 tahun mereka mulai dipingit dan hanya melakukan sedikit pekerjaan karena telah memiliki banyak pembantu. Setelah memasuki usia lima belas atau enam belas tahun, mereka menikah. Kemudian mereka kembali menjalani kehidupan yang terkekang dan tanpa kesibukan.

Kaum priyayi dapat digolongkan berdasarkan kelahiran, hubungan keluarga,

pangkat, kemampuan, hubungan dengan orang-orang Eropa, dan keahlian-keahlian terhadap penguasaan budaya yang sangat dihormati. Kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan dan kepegawaian sipil dapat diperoleh, bila memiliki kemampuan yang cukup, atau karena keturunan yang berasal dari keluarga bangsawan. Kelompok priyayi bukan merupakan golongan yang tertutup, bila seseorang mampu mencapai kedudukan tinggi dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan gaya hidup priyayi maka dapat digolongkan sebagai kelompok priyayi (Sutherland, 1983:66).

KONSEP PENDIDIKAN PEREMPUAN JAWA

Menurut Tirtahardja & Sulo (2005:164) berdasarkan perbedaan ciri penyelenggaraan pendidikan, terdapat tiga jenis pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Pendidikan formal yaitu pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan dengan aturan yang baku, harus berjenjang dan berkesinambungan. Pendidikan nonformal yaitu pendidikan yang ada di masyarakat tidak dipersyaratkan berjenjang dan berkesinambungan, serta aturan yang lebih longgar daripada pendidikan formal, sedangkan pendidikan informal yaitu pendidikan yang diperoleh secara alamiah seperti pendidikan yang terdapat pada lingkungan keluarga.

Menurut Purwanto (2014:20) pendidikan dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang tersusun atas prinsip dan metode, yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi digunakan untuk mengajar murid (secara tidak langsung mengarah pada pendidikan di sekolah). Pendidikan dalam arti yang lebih luas be-

rarti sebuah proses yang terjadi di lingkungan pendidikan, seperti keluarga, sekolah dan masyarakat.

Menurut Syam (1988:6) pengertian pendidikan dalam arti luas bahwa semua pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan, sedangkan pendidikan dalam pengertian yang lebih sempit berarti "pendidikan" dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latarbelakang sosialnya, serta pandangan hidup masyarakat itu kepada warga generasi berikutnya, dan demikian seterusnya.

Pendidikan bagi perempuan merupakan salah satu cara untuk memberantas buta huruf yang masih banyak dialami oleh para perempuan sekitar tahun 1900-an. Pada lingkungan sosial, pendidikan yang diperoleh perempuan mampu meningkatkan harkat dan martabat para perempuan di masyarakat.

Dalam tulisan Kartini yang dikutip oleh Stuers (2008:66) dari perempuanlah manusia pertama kali manusia menerima pendidikan. Ibu-ibu bumiputera tidak akan dapat mendidik anak-anaknya jika mereka sendiri tidak berpendidikan. Bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Pengajaran kepada anak-anak perempuan merupakan rahmat. Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan seorang perempuan sangatlah penting. Meskipun sebagai ibu rumah tangga perempuan juga perlu mendapatkan pendidikan dan wawasan yang luas, agar mereka dapat mendidik anak-anaknya dengan baik. Pengetahuan yang akan diperoleh oleh seorang anak tergantung pada pendidikan pertama yang diperolehnya yaitu pendidikan dalam keluarga, seorang Ibu memiliki peran yang besar dalam memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, selanjutnya

ada pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan formal di sekolah dan pendidikan dari lingkungan.

Menurut Handayani & Novianto (2004:64) dalam praktik pendidikan Jawa, individu yang akan menjadi pribadi Jawa hendaknya selalu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan batin, menunjukkan sikap yang selalu tenang, halus, terkontrol, rasional dan berkepal dingin. Melalui keseimbangan batin orang Jawa berusaha untuk mencegah munculnya emosi-emosi kuat dalam dirinya yang dianggap kurang sopan bila diungkapkan dengan spontan.

Pola pengasuhan budaya Jawa menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dididik untuk mencari nafkah dan diberi kesempatan untuk menciptakan cita-cita tinggi sehingga orientasinya keluar rumah. Untuk itu anak laki-laki dibebaskan dari tugas-tugas rumah tangga. Bagi anak-anak perempuan sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi Ibu dan Istri yang berbakti kepada suami. Maka dari itu anak perempuan hanya dibekali ketrampilan-ketrampilan praktis untuk mengurus dan mengelola rumah tangga (Handayani & Novianto, 2004:15).

Berdasarkan pola pengasuhan budaya Jawa tersebut dapat terlihat bahwa pola pengasuhan antara anak laki-laki dan perempuan berbeda. Jika dibandingkan antara pendidikan yang diperoleh oleh laki-laki dan perempuan terlihat bahwa laki-laki lebih diberi kebebasan untuk dapat memperoleh pendidikan. Hal tersebut dikarenakan laki-laki yang berperan diluar sektor rumahtangga. Laki-laki dapat lebih mudah berinteraksi dalam masyarakat. Mereka pun diberikan kesempatan untuk mencapai cita-citanya salah satunya melalui pendidikan formal yang ada di sekolah-sekolah.

Sebaliknya berbeda dengan anak laki-laki, anak-anak perempuan Jawa lebih

dipersiapkan untuk mengurus sektor rumahtangga seperti menjadi ibu dan istri. Para perempuan tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan formal di sekolah, namun mereka diberikan ketrampilan-ketrampilan untuk dapat mengurus kebutuhan rumah tangga seperti memasak, dan mengasuh anak.

Menurut Gouda (2007:137) setelah tahun 1900 terjadi peningkatan kedudukan perempuan pribumi yang dilakukan dengan mendirikan beberapa sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah ini dirancang khusus untuk mendidik para gadis Jawa dan mempersiapkan mereka sebagai ibu rumah tangga. Sekolah ini bertujuan untuk melahirkan para perempuan terdidik meskipun mereka memiliki kewajiban sebagai istri dan ibu sesuai kodrat mereka sebagai seorang perempuan.

Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan bahwa setelah tahun 1900 mulai ada sekolah-sekolah formal yang didirikan untuk para perempuan Jawa. Sekolah tersebut bertujuan untuk menjadikan perempuan Jawa sebagai orang yang terdidik dalam mengurus masalah rumahtangga. Pendidikan yang ada pada tahun 1914-1942 adalah pendidikan formal berupa pendidikan dasar dan menengah untuk pribumi, serta pendidikan kejuruan. Salah satu sekolah yang didirikan bagi para perempuan adalah Sekolah Kartini.

Peningkatan kedudukan perempuan pribumi yang dilakukan melalui bidang pendidikan yakni dengan mendirikan beberapa sekolah-sekolah swasta bagi perempuan. Sekolah-sekolah ini dirancang khusus untuk mendidik para gadis Jawa dan mempersiapkan mereka sebagai ibu rumah tangga (Gouda, 2007:137). Sekolah ini melahirkan para perempuan terdidik meskipun mereka memiliki kewajiban sebagai istri dan ibu sesuai kodrat mereka sebagai seorang perempuan. Kaur (2002:6) menjelaskan lebih lanjut bahwa pendidikan

adalah satu hal mendasar yang memungkinkan kaum perempuan untuk menegaskan hak-hak dasar mereka, untuk melatih kaum perempuan secara bijaksana dan untuk bisa berkarya bagi perluasan ide-ide mereka.

Menurut Mangunwijaya (1980:11-12) pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda memiliki beberapa ciri sebagai berikut:

1. Tujuan utama pendidikan kaum terpelajar ialah membentuk orang-orang yang terampil untuk pelaksanaan operasional seluruh mekanisme Hindia Belanda.
2. Kaum terpelajar harus dipisahkan secara halus dari rakyat. Salah satu caranya adalah kemahiran bahasa Belanda (bahasa asing) sebagai salah satu syarat penilaian penerimaan pegawai pemerintah kolonial. Selain itu adanya peniruan dan menanamkan gaya hidup yang sesuai dengan budaya Belanda.
3. Sistem pengajaran dan sasaran pengajaran disesuaikan dengan kebutuhan struktur-struktur industri dan bisnis yang dibutuhkan oleh pemerintah Belanda.
4. Hanya cabang-cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang dibutuhkan pemerintah Hindia Belanda atau industri-industri penunjangnya yang mendapat promosi pengembangan dan bantuan dana yang banyak.
5. Siswa dan mahasiswa yang mendapat pendidikan kolonial Belanda hanya dipersiapkan untuk menjadi pelaksana setia saja, maka dibuatlah jurusan-jurusan yang mendidik keahlian legislatif (pemerintahan) yang menghindarkan adanya kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang memihak pada rakyat. Pemerintah Hindia Belanda menghindari pemberian dana yang cukup untuk pendidikan ahli seperti pemikir, konseptor untuk penelitian-penelitian, serta ilmu-ilmu kemasyarakatan, dan filsafat.
6. Ilmu-ilmu sosial juga diajarkan dalam pendidikan kolonial, namun terbatas pada fungsinya yang menata perilaku manusia atau *social engineering* yang menunjang kemajuan industri dan perdagangan pemerintah Hindia Belanda.
7. *Devide at impera* adalah politik adu domba yang dilakukan antara lapisan masyarakat yang berpendidikan, diperketat dengan sistem penghargaan dan penghukuman, adanya istilah penganak-emasan dan penganak-tirian jenis-jenis sarjana dan tenaga-tenaga ahli. Demikian juga sistem kemasyarakatan yang diatur oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda misalnya para intelektual diberi status yang lebih rendah daripada para kaum terampil sebagai pelaksana setia terhadap pemerintah Belanda.
8. Pada sistem pendidikan kolonial, sistem penerimaan murid secara formal harus terbuka bagi setiap calon murid yang memenuhi syarat. Namun secara faktual penerimaan murid pada lembaga pendidikan formal diusahakan agar lebih mendahulukan putera-puteri kaum elite.
9. Sekolah-sekolah formal harus diberi status. Prioritas dana seta perhatian terhadap sekolah formal lebih besar daripada pendidikan non-formal. Adanya anggapan bahwa sekolah formal adalah tempat pendidikan anak-anak kaum

elite, sedangkan sekolah non-formal dianggap sebagai sekolah yang menampung anak-anak dari lapisan rakyat.

10. Hubungan antara guru dan murid harus dijaga, agar tidak menjurus kearah dialog yang dapat menurunkan status *hirarkis* para guru selaku instruktur dan pihak pemberi kepandaian dan keterampilan bagi muridnya.
11. Dunia pendidikan, sekolah dibuat dengan bermacam-macam mekanisme dan persyaratan, sehingga seolah-olah selalu merupakan dunia kaum elite. Sistem harus ditata secara tidak kentara namun efektif, agar siswa dan mahasiswa selalu merasa status dirinya diatas rakyat biasa dan orang yang tidak terpelajar.

Pendidikan bagi perempuan dibahas dalam Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Menurut Blackburn (2007:148) pendidikan bagi perempuan merupakan salah satu permasalahan yang dibahas dalam Kongres Perempuan pertama yang berlangsung selama 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres Perempuan tersebut diikuti oleh utusan-utusan dari berbagai perhimpunan perempuan Indonesia.

MOSI TENTANG SEKOLAH PEREMPUAN

Telah mendengarkan pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan tentang pendidikan untuk anak-anak perempuan,
Menimbang bahwa pada masa sekarang ini masih banyak orang tua yang tidak suka memasukkan anak perempuannya ke sekolah

di mana murid laki-laki dan perempuan belajar bersama, sehingga saat ini belum banyak anak-anak perempuan bersekolah disekolah menengah dan sekolah tinggi.

MENETAPKAN

Meminta pengurus Perikatan Perempuan Indonesia untuk memohon kepada pemerintah menambah sekolah-sekolah perempuan.
Memberitahukan mosi ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan pers di Seluruh Indonesia, dan setelah itu meneruskan pembicaraan.

Sumber: Blackburn (2007:148)

Berdasarkan pernyataan tentang mosi yang ditetapkan pada Kongres Perempuan tahun 1928 dapat dianalisis bahwa pada Kongres Perempuan pertama sangat memperhatikan pendidikan bagi kaum perempuan. Kongres Perempuan pertama pada tahun 1928 merupakan sebuah usaha untuk melakukan peningkatan pendidikan bagi anak-anak perempuan dengan melakukan pembahasan mengenai rencana mendirikan sekolah-sekolah perempuan. Berikut ini data yang menunjukkan adanya pendidikan bagi perempuan

Berikut ini perbandingan jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin pada *Holands-Indische Scholen (HIS)* negeri dan sekolah swasta:

Tabel 1 Jumlah siswa pribumi *Hollands-Indische Scholen*, sekolah negeri

Tahun	Siswa laki-laki	Siswa perempuan
1915	18.970	3.490
1925	28.722	10.195
1929-1930	29.984	11.917
1934-1935	31.231	15.492
1939-1940	34.307	19.605
Total	143.214	60.699

Sumber: Gouda (2007:200) *Dutch culture overseas*: praktik kolonial di Hindia-Belanda 1900-1942.

Tabel 2 Jumlah siswa pribumi *Hollands-Indische Scholen (HIS)*, sekolah swasta

Tahun	Siswa laki-laki	Siswa perempuan
1915	1.195	1.049
1925	14.529	6.258
1929-1930	14.055	6.941
1934-1935	14.077	8.355
1939-1940	15.915	10.838
Total	59.711	33.411

Sumber: Gouda (2007:200) *Dutch culture overseas*: praktik kolonial di Hindia-Belanda 1900-1942.

Menurut Stuers (2008:96) sejak awal perjuangan kaum perempuan memberikan perhatian terhadap pendidikan bagi para perempuan. Kaum perempuan mulai sadar terhadap pentingnya sistem pendidikan moderen, tetapi hal itu belum dapat diwujudkan pada awal tahun 1900. Pada tahun 1913 pemerintah Belanda hanya menyediakan dana 1,5 juta gulden untuk pengembangan pendidikan bagi 40 juta penduduk Indonesia (Hindia-Belanda). Pada tabel di atas nampak bahwa jumlah siswa laki-laki pada *Hollands-Indische Scholen (HIS)* lebih banyak daripada siswa perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan pendidikan daripada kaum perempuan. Untuk dapat bersekolah di pendidikan formal yang didirikan oleh Belanda salah satu syaratnya harus bisa berbahasa Belanda, karena Bahasa Belanda

digunakan sebagai bahasa pengantar. Sehingga yang dapat bersekolah kebanyakan adalah golongan elit bumiputera.

SIMPULAN

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kedudukan perempuan. Melalui pendidikan memungkinkan kaum perempuan untuk menegaskan hak-hak dasar mereka, untuk melatih kaum perempuan secara bijaksana dan untuk bisa berkarya bagi perluasan ide-ide mereka. Meskipun perempuan memiliki kewajiban sebagai istri dan ibu sesuai kodrat mereka sebagai seorang perempuan namun harus tetap mendapatkan pendidikan yang sama dengan laki-laki agar dapat mengembangkan pemikiran serta gagasan yang cemerlang. Perempuan Jawa mulai mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan setelah tahun 1900 mulai ada sekolah-sekolah formal

yang didirikan untuk para perempuan Jawa. Sekolah tersebut bertujuan untuk menjadikan perempuan Jawa sebagai orang yang terdidik dalam mengurus masalah rumahtangga. Pendidikan yang ada pada tahun 1914-1942 adalah pendidikan

formal berupa pendidikan dasar dan menengah untuk pribumi, serta pendidikan kejuruan. Salah satu sekolah yang didirikan bagi para perempuan adalah Sekolah Kartini.

DAFTAR RUJUKAN

- Blackburn, S. 2007. *Kongres Perempuan Pertama*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dhont, F. 2005. *Nasionalisme Baru Intelektual Indonesia tahun 1920-an*. Yogyakarta: Gaja Mada University Press.
- Gouda, F. 2007. *Dutch Culture Overseas*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Gunawan, A. 1986. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hardi, L. 1984. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi Kumpulan Pengalaman dan Pemikiran Buku IV*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Handayani & Novianto. 2004. *Kuasa Wanita Jawa*. Yogyakarta: LKIS. Yogyakarta.
- Kaur, M. 2002. *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mangunwijaya, Y.B. Juli 1980. Paradigma Baru bagi Pendidikan Rakyat. *Prisma*, hlm 11.
- Margana, S. & Nursam, M. 2010. *Kota-Kota di Jawa Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: Ombak.
- Murniati, A.N.P. 2008. *Getar Gender Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum dan HAM*. Magelang: Indonesia Tera.
- Nasution, S. 2008. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Niel, R.V. 1960. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan Noer. 1984. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Pane, A. 2006. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwanto, N. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekiman, D. 2011. *Kebudayaan Indis: dari Zaman Kompeni sampai Zaman Revolusi*. Depok: Komunitas Bambu.
- Stuers, C.D. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia Gerakan & Pencapaian*. Depok: Komunitas Bambu.
- Sutherland, H. 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Syam, M.N. 1988. *Pengantar Dasar-dasar Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Tirtarahardja, U., & Sulo, S.L.L. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.